

HUMANIKA

Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum

Volume 4 Nomor 1, Mei-Agustus 2004

- **Gaya Hidup Konsumtif Suatu Tinjauan Umum Pada Masyarakat Perkotaan di Jawa.**
Dina Dwikurniarini
- **Dimensi Kependidikan Dalam Ajaran Konfusius.**
Rukiyati
- **Komunikasi Politik Untuk Resolusi Konflik.**
Budi Sayoga
- **Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam.**
Ajat Sudrajat



**UNIT PELAKSANA TEKNIS MATA KULIAH UMUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

HUMANIKA

Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum

Volume 4 Nomor 1, Mei - Agustus 2004

- ◆ Penerbit: UPT MKU Universitas Negeri Yogyakarta
- ◆ Pelindung dan Penasehat: Pembantu Rektor I UNY
- ◆ Penanggung Jawab/Pemimpin Umum: Ketua UPT MKU UNY
- ◆ Penyunting Ahli: Dr. Muhsinatun Siyash Masruri, M.Pd. dan Dr. Maman Suryaman, M.Pd.
- ◆ Pemimpin Redaksi: Drs. Suranto, M.Pd., M.Si.
- ◆ Sekretaris Redaksi: Drs. Marzuki, M.Ag., Dra. L. Andriani P., M.Hum.
- ◆ Anggota Redaksi: Drs. Ajat Sudrajat, M.Ag., Drs. Kus Eddy Sartono, M.Si., Dra. Dina Dwi Kurniarini, M.Hum., Dra. Rukiyati, M.Hum., Dra. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si., dan Dra. Mawanti W.
- ◆ Tata Usaha/Pelaksana: Drs. Murtamadji, M.Si., Dra. Y. Nurasih.
- ◆ Tata Letak: Dra. Mami Hajaroh, M.Pd., Amir Syamsudin, S.Ag., M.Ag.
- ◆ Alamat Redaksi/Tata Usaha: UPT MKU UNY Karangmalang Yogyakarta 55281. Telepon: (0274) 586168 Pesawat 251.

HUMANIKA Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum menerima kiriman tulisan/ artikel yang terkait dengan Mata Kuliah Umum (MKU), yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, dan Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah bisa berupa hasil penelitian atau artikel ilmiah bebas dan belum pernah diterbitkan.
2. Naskah diketik dengan spasi ganda (2 spasi) dengan jumlah halaman 10 -15 halaman kuarto, diketik dengan *MS Word* ukuran *font 12 Times New Roman*.
3. Naskah memuat komponen: judul (< 10 kata), nama penulis, abstrak (100-150 kata), isi karangan (yang memuat pendahuluan, pembahasan, dan penutup/ kesimpulan), daftar pustaka, dan biodata penulis.
4. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan disket kecil.
5. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis seperti berikut:
Rakhmat, Jalaluddin. (1994). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Urbaningrum, Anas. (1998). "Menyorot Masalah Integrasi Nasional Kita". *Republika*. 25 Juli, hal. 6.

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan dan Ridho-Nya akhirnya penerbitan jurnal HUMANIKA Volume 4 Nomor 1, Mei - Agustus 2004 dapat terlaksana. Hal ini juga atas kerja keras dari dewan redaksi yang penuh dedikasi. Tidak lupa redaksi menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan artikel-artikelnya demi terwujudnya penerbitan jurnal ini.

Ketidakselarasan adalah situasi dimana ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara tuntutan dan realita. Ketidakselarasan bisa terjadi karena berbagai faktor, antara lain karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat sebagai konsekuensi dari perubahan dan kemajuan kondisi sosial ekonomi suatu bangsa. Dengan adanya kemajuan, kita berharap ada peningkatan yang signifikan terhadap segala segi kehidupan. Namun realitanya kemajuan juga membawa permasalahan-permasalahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Permasalahan yang umum terjadi adalah kemiskinan, pengangguran, pengusuran, kerusakan lingkungan, masyarakat konsumtif, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidakselarasan atau incompatibilities dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi suatu masyarakat terjadi karena berbagai sebab. Dina Dwikurniarini mengulas ketidak selarasan itu dan aspek begitu cepatnya perubahan perubahan gaya hidup konsumtif dilihat dari kecenderungan masyarakat pada produk atau model tertentu. Rukiyati menunjukkan salah satu sumber nilai pendidikan dalam ajaran konfusius untuk keselarasan. Konfusius berpandangan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesempatan pendidikan.

Reformasi sosial politik belum berjalan secara optimal. Dampaknya adalah suasana ketidak selarasan. Berkaitan dengan hal ini Budi Sayoga menulis tentang Komunikasi Politik untuk Resolusi Konflik. Sementara itu penulis-penulis lain dalam edisi ini menyoroti saling hubung antara nilai moral, agama, ideologi, teknologi dan ketidakselarasan dimasyarakat. Tentu saja para penulis ini disamping mengidentifikasi masalah yang timbul juga mengajukan solusi ke arah pemecahannya. Bagaimana dan mengapa nilai-nilai moral, Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik menjadi referensi untuk menemukan alternatifstrategi atau orientasi baru dalam rangka merubah konflik strategi atau orientasi baru dalam rangka merubah konflik menjadi integrasi. Tulisan- tulisan dalam HUMANIKA nomor ini bermuara pada pertimbangan - pertimbangan diatas. Selamat Membaca.

Yogyakarta, Agustus 2004
Redaksi

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi. /ii

Daftar Isi. /iii

Gaya Hidup Konsumtif Suatu Tinjauan Umum Pada Masyarakat Perkotaan Di Jawa. Dina Dwikurniarini/ 1 - 11.

Dimensi Kependidikan Dalam Ajaran Konfusius. Rukiyati / 12 - 22.

Komunikasi Politik Untuk Resolusi Konflik. Budi Sayoga / 23 - 34.

Dampak Teknologi Terhadap Bidang Pertanian. Yulia Ch. Nany S. / 35 - 42.

Wacana Tafsir Dalam Dialektika Filsafat. Amir Syamsudin / 43-55.

Pendidikan Moral Dalam Prespektif Islam. Ajat Sudrajat / 56 - 67.

Implikasi Pelaksanaan Perlindungan Anak Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah. Eni Kusdarini/ 68 - 81.

Pemberdayaan Warga Negara Dalam Bidang Ekonomi Dalam Perspektif Politik. Suyato / 82 - 94.

✓ Landasan Nilai - Nilai Etis Pancasila Bagi Perkembangan Teknologi Dan Teknologi Pemakaian Bahan Bakar Migas. Heru Santoso / 95 - 104. ✓

Peran Mahasiswa Dalam Menciptakan Pemerintah Yang Bersih Dan Berwibawa. Sigit Dwi Kusrahmadi / 105 - 118.

Pembinaan Nilai - Nilai Budaya Tata Krama Pergaulan Pada Masyarakat Jawa. Puji Lestari/ 119 - 128.

Sunyoto Usman, "Recognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan: Tinjauan Sosiologi Lingkungan", Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan: Tinjauan Hukum, Sosial, Politik, dan Pelestarian Sumber Daya Alam, Radisson Hotel Yogyakarta tanggal 27-28 September 1999.

Biodata Penulis

*) **Suyato**, lahir di Wonogiri, 16 Juni 1967, Alumnus PMP dan Kewarganegaraan FPIPS IKIP YOGYAKARTA Tahun 1993. Sejak Tahun 1994 menjadi staf pengajar pada jurusan yang sama.

LANDASAN NILAI-NILAI ETIS PANCASILA BAGI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN TEKNOLOGI PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MIGAS

Oleh Heru Santoso *)

Abstrak

Teknologi sebagai hasil dari peradaban manusia merupakan sesuatu bukti bahwa manusia adalah makhluk rasional yang progresif kreatif dan inovatif dalam menghadapi hidupnya. Kemajuan teknologi saat ini telah membawa manusia pada kemampuan mengendalikan alam dan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Di lain pihak, kemajuan teknologi berimplikasi ganda terhadap kehidupan manusia itu sendiri, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan kata lain, teknologi selalu berkaitan dengan aspek kehidupan manusia yang lain, yaitu nilai-nilai etis atau moral.

Teknologi yang berkembang di Indonesia seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai etis Pancasila, karena Pancasila adalah ideology dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demikian pula, khususnya perkembangan teknologi dalam pemakaian bahan bakar migas sebagai bagian dari rekayasa teknologi di Indonesia.

Pemakaian bahan bakar migas yang dilandasi oleh nilai-nilai etis Pancasila menjadi bukti bahwa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ditempatkan secara proporsional. Artinya, iptek adalah objek, alat dan sarana, sedangkan manusia tetap sebagai subjek yang mengendalikan iptek untuk kesejahteraan umat manusia.

Pendahuluan

Teknologi yang mulai berkembang sejak jaman nenek moyang dimulai dengan teknologi waktu, ruang dan bahasa. Keberadaan tiga variabel ini, adalah dengan pertimbangan bahwa ketiganya merupakan abstraksi yang akan terkait dengan teknologi secara lebih jauh. Dilihat dari perkembangannya, teknologi berkembang dengan pesat di negara barat pada masa pencerahan abad XVII, dan puncaknya terjadi pada saat revolusi industri di

Inggris, dan di abad ini pulalah terjadi transformasi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Meskipun teknologi sudah ada sejak manusia ada di bumi, lompatan spektakuler baru terjadi pada abad XVIII dan XIX. Teknologi akan bermanfaat bagi manusia, bila manusia dapat mengetahui karakter dari teknologi tersebut, sehingga penerapan teknologi dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan manusia. Karakter teknologi yang perlu diketahui, yaitu, teknologi pada hakikatnya adalah "tangan", teknologi bersifat "dialektik" dan teknologi memerlukan energi yang besar untuk operasional-nya.

Analisis Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber alam ada yang tidak dapat dipulihkan dan ada yang dapat dipulihkan kembali. Yang tidak dapat dipulihkan, seperti gas, minyak, batu bara dan mineral, sedangkan yang dapat dipulihkan seperti hasil hutan, hasil laut, air dan sumber biologis lain.

Pengolahan dan pengelolaan sumber alam yang habis pakai harus diupayakan secara bijaksana, terutama agar dapat meningkatkan kemampuan taraf hidup rakyat, sehingga sumber alam yang telah dikuras tidak menurunkan kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dipulihkan juga memerlukan perhatian dalam hal pelestarian sumber alam yang lain, sehingga sumber alam masih tetap utuh dan dapat dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Kusnadi (1986: 41) menjelaskan :

"Kebijakan pembangunan dengan mengembangkan lingkungan hidup perlu diusahakan untuk memperluas dimensi pembangunan itu sendiri. Pembangunan tidak hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup dalam arti material saja, tetapi pembangunan juga penting untuk meningkatkan taraf hidup yang dalam arti mutu kehidupan."

Pengembangan pola hidup yang serasi dengan daya dukung sumber alam dan lingkungan fisik dan sosial, merupakan suatu usaha yang perlu dilaksanakan untuk menumbuhkan dan membina

hubungan timbal balik yang serba selaras antar manusia, masyarakat dan lingkungan hidup merupakan modal dasar bagi pem-bangunan, sehingga perlu dikenali dengan seksama dan menyeluruh. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari modal, keahlian dan keterampilan, serta fasilitas dan kemampuan pengelolaan yang terbatas, maka inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan perlu dilaksanakan. Kerusakan-kerusakan sumber alam oleh proses pembangunan, tidak saja mengarah kepada kepunahan sumber alam tersebut untuk kehidupan manusia, tetapi juga akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pula pada sumber-sumber alam lainnya (Kusnadi, 1986: 42).

Kerusakan sumber alam oleh proses pembangunan menyebabkan berkurang-nya sumber alam tersebut, sehingga pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup harus mempertimbangkan segi-segi pembangunan wilayah menurut ruang dan waktu.

Pendayagunaan sumber-sumber alam akan menghasilkan bahan-bahan sisa (residu) yang biasanya dibuang ke dalam lingkungan. Apabila pembuangan tersebut melampaui daya asimilasi lingkungan hidup, maka ekosistem akan rusak dan masyarakatlah yang akan menanggungnya. Damarjati (1993: 131) menjelaskan tentang residu/bahan-bahan sisa :

"Alam semesta berdiri di atas prinsip keikhlasan, di dalamnya terdapat residu yang dapat didaur ulang, sehingga kembali dapat mendatangkan kemanfaat-annya."

Lebih jauh dikatakan bahwa :

"Api yang berdiri sendiri bersifat membakar segala sesuatu. Tetapi bila ada dalam suatu sistem, dalam satu kesatuan lampu, maka akan mendatangkan penerangan yang berlipat ganda."

Oleh karena itu, sejak awal perlu ditetapkan kebijakan pokok dalam penge-lolaan lingkungan hidup, di samping itu kriteria-kriteria bahan buangan pun perlu segera ditetapkan, sedangkan pengendalian pencemaran melalui penggunaan teknologi yang baik dan pengaturan lokasi perlu ditetapkan secara lebih mantap. Di samping itu, analisis lingkungan dan kegiatan-kegiatan perlu dikembangkan dalam tahap perencanaan kegiatan, dan dari

penilaian hasil-hasil analisis pengaruh lingkungan tersebut, perlu ditetapkan cara, pola dan prosedur penilaian dan perkembangannya dalam proses pembangunan (Kusnadi, 1986: 44). Kusnadi (1986: 44) menjelaskan :

"Penggunaan energi dalam pembangunan merupakan sumber pencemaran lingkungan yang utama, oleh karena itu, kebijakan pengelolaan energi perlu secara tegas dikaitkan dengan kebijakan perlindungan lingkungan hidup."

Dalam pengembangan lingkungan hidup, peranan manusia dan masyarakat sangat menentukan. Manusia dan masyarakat dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup, tetapi sebaliknya, manusia dan masyarakat dapat pula menjadi penyelamat dan pembina lingkungan hidup yang sehat dan bertanggung jawab. Untuk keperluan tersebut, pembinaan peraturan dan perundangan lingkungan hidup dan sumber alam perlu ditingkatkan, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dalam Bab III pasal 3, yaitu :

"Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa."

Dengan demikian, untuk mencapai masyarakat yang serasi dan seimbang, adalah dengan pengembangan sumber alam dan pengelolaan lingkungan sumber alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang terus ditingkatkan, sehingga pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya seperti yang tercantum dalam UUD 1945 akan tercapai.

Langkah-langkah pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penduduk, pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pembangunan pertanian dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Industri, pertambangan dan energi, serta pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemilikan dan penguasaan tanah, tata guna tanah, tata guna air, tata guna ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pembangunan prasarana dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Pemanfaatan wilayah pesisir dan lautan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Pengaturan biaya pembangunan lingkungan hidup.
8. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.
9. Pembinaan hukum dan aparatur, dalam pengelolaan sumber dalam lingkungan hidup. (Kusnadi, 1986: 46-72).

Landasan Nilai-nilai Etis Pancasila bagi Perkembangan Teknologi

Hubungan antara manusia dan teknologi harus selaras, artinya manusialah yang harus menguasai teknologi, bukan sebaliknya. Karakter teknologi menyatakan teknologi sebagai tangan, teknologi bersifat dialektik, dan teknologi memerlukan energi yang sangat besar. Dari karakter-karakter tersebut, terlihat bahwa teknologi merupakan pedang bermata dua, yang dapat digunakan untuk kebaikan dan dapat digunakan untuk keburukan, sehingga penerapan teknologi memerlukan landasan etis, baik etika individu, sosial maupun etika lingkungan. Etika praktis diperlukan oleh para teknolog, karena para teknolog dapat menggunakan hal yang baik dan yang buruk dari hasil ciptaannya tersebut. Hal ini berkaitan dengan aliran Hedonisme, yang mengajarkan bahwa kesenangan merupakan satu-satunya nilai yang ingin dicapai manusia. Kesenangan yang langsung dialami oleh panca indera. Teknologi mempunyai peranan memperluas dan memperbesar potensi manusia dalam memenuhi kebutuhan praktisnya.

Perkembangan teknologi merupakan proses yang seakan-akan berlangsung secara otomatis, tidak tergantung dari kemauan manusia.

Teknologi merupakan alat kepanjangan manusia dan tergantung dari manusia itu sendiri bagaimana seharusnya mengendalikan diri. Teknologi sebagai sebuah sistem keterampilan

praktis, mempunyai sejumlah *input* yang kemudian dipergunakan untuk menghasilkan *output*. Salah satu *input*nya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang meliputi asas, kaidah dan teori ilmiah dipergunakan oleh teknologi sebagai *output* yang dapat berupa barang atau yang lainnya. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat simetris, yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Di abad modern ini, perkembangan ilmu dan teknologi maju demikian pesat sehingga manusia mestinya menyadari bahwa penanganan masalah-masalah moral yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi perlu dilakukan.

Sedangkan penanganan masalah etis yang berbeda-beda merupakan tanggung jawab bagi pencipta teknologi. Prinsip-prinsip moral dasar menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta menjadi tolok ukur dalam penilaian baik dan buruknya suatu tindakan. Penerapan ini dapat berwujud pengambilan keputusan dan tindakan dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Penerapan ini dapat berwujud kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis, sehingga menggugah kesadaran manusia akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupan bersama dalam berbagai dimensi.

Landasan Nilai-nilai Etis Pancasila bagi Teknologi Pemakaian Bahan Bakar Migas

Kecanggihan teknologi sepatutnya diikuti dengan kebijaksanaan dan kearifan manusia. Manusia dapat terperangkap oleh teknologi yang merupakan hasil ciptaan-nya sendiri. Berdasarkan karakter teknologi, terdapat teknologi yang memerlukan energi yang sangat besar, seperti pembangkit listrik atau teknologi transportasi. Sumber energi ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar, baik itu bahan bakar minyak maupun yang lain. Pembakaran bahan bakar minyak, banyak menimbulkan gas yang beracun seperti gas CO, CO₂, SO_x, NO_x, HC, sehingga diperlukan etika lingkungan hidup agar tidak merusak lingkungan. Era tahun 1960-an, mulai dikenal dan diinsyafi tentang teknologi dan lingkungan hidup. Ancaman bagi lingkungan hidup perlu

diperhatikan, terutama dari pemakaian teknologi pengguna migas, dan ini tergantung dari manusia sebagai pengguna teknologi, dan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingannya. Menurut Johan Galtung, ada 3 etika lingkungan, yaitu Etika Egosentris, Homosentris dan Etika Ekosentris. Teori etika lingkungan ini dapat menimbulkan pemahaman baru, sehingga manusia tidak bersikap eksploitatif terhadap sumber alam. Etika lingkungan perlu dikembangkan untuk mengendalikan diri manusia dan harus bertumpu pada sumber alam. Etika lingkungan yang mampu memberi penjelasan dan pertanggungjawaban rasional tentang nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma bagi sikap dan moral manusia, sulit didapatkan. Johan Galtung memberikan pandangan pada teorinya tentang Etika Homosentris yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Etika ini mendasarkan diri pada model kepentingan sosial dan pendekatan terhadap pelaku lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia. Etika Homosentris ini identik dengan etika Utilitarianisme yang mengarah pada penggunaan sumber-sumber alam dengan dalih demi kepentingan dan kebaikan masyarakat.

Pengaruh gas akibat teknologi pengguna bahan bakar migas akan terasa pada kesehatan manusia, karena gas tersebut masuk dalam paru-paru manusia dan diikat oleh darah manusia. Gas-gas beracun tersebut pada dasarnya dapat diatasi kadarnya dengan cara memodifikasi pembakarannya. Dengan cara modifikasi inilah diharapkan gas-gas yang dikeluarkan pada saat pembakaran menjadi tidak berbahaya lagi bagi kehidupan, terutama bagi manusia.

Bahan bakar migas merupakan bahan bakar yang habis pakai, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan tersendiri dalam pemakaiannya, agar tidak kehabisan. Ada tiga hal dalam kebijakan mengenai bahan bakar migas, yaitu untuk migas yang dipakai dalam pembakaran, diusahakan untuk dicarikan sumber migas yang baru, pemakaian bahan bakar migas mulai dikurangi dan dikendalikan, agar sumbernya tidak habis dan yang terakhir, karena bahan bakar migas tidak merata, maka sering terjadi pertikaian antar negara yang sumber masalahnya berasal dari produksi migas yang melimpah. Sumber alam tersebut, dalam pengolahan maupun pengelolaannya haruslah secara bijaksana, terutama untuk peningkatan taraf hidup

rakyat sehingga sumber alam yang telah dikuras tidak mengurangi kemakmuran rakyat. Pembangunan tidak hanya penting untuk meningkatkan taraf hidup material saja, akan tetapi juga penting untuk meningkatkan taraf hidup yang hakiki, yaitu untuk meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Penggunaan sumber alam untuk pembangunan merupakan sumber pencemaran lingkungan, sehingga pengelolaan sumber alam harus dilakukan dengan tegas, yang dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab dan asas berkelanjutan yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, serta masyarakat Indonesia seluruhnya, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar negara.

Kesimpulan

Manusia dapat terperangkap oleh teknologi yang merupakan hasil ciptaan-nya sendiri. Berdasarkan karakter teknologi, terdapat teknologi yang memerlukan energi yang sangat besar, yang didapatkan dari pembakaran bahan bakar antara lain minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, maka pengolahan dan pengelolaannya harus diupayakan secara bijaksana, terutama agar dapat meningkatkan kemampuan taraf hidup rakyat. Untuk itu, manusia sebagai pencipta dan pemakai teknologi harus memperhatikan nilai-nilai etik tentang lingkungan hidup.

Etika Homosentris yang disampaikan oleh Johan Galtung dapat dijadikan acuan etika lingkungan dalam mendasari sikap dan tindakan manusia pencipta dan pemakai teknologi, khususnya untuk teknologi berbahan bakar minyak dan gas. Etika ini mendasarkan diri pada model kepentingan sosial dan pendekatan terhadap pelaku lingkungan yang melindungi sebagian besar masyarakat manusia.

Khususnya Indonesia, teknologi yang berkembang di Indonesia seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai etis Pancasila, karena Pancasila adalah ideology dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pemakaian bahan bakar migas yang dilandasi oleh nilai-nilai etis Pancasila menjadi bukti bahwa penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ditempatkan secara proporsional antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Berten, K., 1993, *Etika*, Gramedia, Jakarta.

Damarjati Supadjar, 1993, *Nawangari*, Media Widya Mandala, Yogyakarta.

Franz Magnis-Suseno, 1991, *Etika Sosial*, Gramedia, Jakarta.

Galtung, J., 1967, "Violence, Peace, and Peace Research", dalam *Journal of Peace Research (JPS)*, No.3, Vol. 6, hal. (167-191) dalam terjemahan Kebebasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian dalam Mochtar Lubis (Penyunting), 1988, *Menggapai Dunia Damai*, Yayasan Obor, Jakarta.

Jacob, T., 1987, *Manusia Ilmu dan Teknologi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Kattsoff, L.O., 1986. *Pengantar Filsafat*, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1986, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Lukman Sutrisno. Dkk, 1997, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan dengan Masyarakat Sekitar*, P3PK, UGM, Yogyakarta.

- paparan gagasan -
 - hanya mengandalkan dua sumber acuan, yaitu Koesnadi Hardjosoemantri (1986) dan Damarjati Supadjar (1993).
 - m. nas. tak ada, di luar lembaga -
 - h. 95 - 104.
- 50% x 6 = 3

Mangun Wijaya, Y.B., (ed)., 1983, *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya*, Obor Indonesia, Jakarta.

Mardimin, J., (ed), 1994, *Jangan Tangisi Tradisi*, Kanisius, Yogyakarta.

O'Gorman, Edmundo, 1975, "History, Technology and The Pursuit of Happiness", Dalam *The Frontiers of Knowledge*.

Peursen, C.A. Van., 1976, *Strategi Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko, Kanisius dan BPK Bunny Mulia Yogyakarta.

Poespoprodjo, W, 1986, *Filsafat Moral*, Remadja Karya, Bandung.

Sunyoto Usman, dkk., 1981, *Dampak Industri terhadap Aspek Sosio-Kultural Masyarakat Sekitarnya*, Laporan Penelitian, UGM, Yogyakarta.

Suhardjono, 1985, *Teknologi Minyak Bumi I*, Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Kimia, UGM, Yogyakarta.

Supriyanto D, 1991, *Pengendalian Pencemaran Udara*, Majalah Pertamina No.99, Th. XXVI.

The Liang Gie, 1996, *Pengantar Filsafat Teknologi*, Andi, Yogyakarta.

Warno Husodo, 1979, *Pengantar Pengenalan Lapangan Minyak dan Gas Bumi*, Fakultas Teknik Perminyakan UPN, Yogyakarta.

Zubair, Achmad Charris, 1987, *Kuliah Etika*, Rajawali, Jakarta.

Biodata Penulis

*) Heru Santoso,

PERAN MAHASISWA DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh Sigit Dwi Kusrahmadi *)

Abstrak

Masa Reformasi ditandai dengan lengsernya kekuasaan Orde Baru memberikan angin segar untuk pembaruan di segala bidang, namun demikian dalam kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Pemerintah Megawati Sukarnoputri sebagai penerus estafet kepemimpinannya kurang memihak kepentingan masyarakat marginal, ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), pelanggaran HAM, birokrasi keranjang Sampah, tidak efektif dan tidak berkembang dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan mampu menjadi pembaru agen of change dalam memperbaiki kehidupan berbangsa. Peran mahasiswa sebagai intelektual muda, berkepribadian bangsa dan mempunyai idealisme tinggi diuntut untuk mewujudkan negara yang lebih demokratis. Pemikiran yang kritis, konstruktif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah sangat efektif sebagai alat kontrol.

Dalam perwujudan pemerintah yang bersih selain pemilihan presiden secara langsung, perlu mengganti kabinet presidensial dengan kabinet parlementer yang dapat mewakili aspirasi nyata dari masyarakat. Sudah saatnya pejabat-pejabat pemerintah menggunakan konsep pelayanan bukan penguasa, dan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Konsep "top down", diganti dengan konsep "bottom up" pemerintah hanya sebagai "regulator" dan partisipasi masyarakat harus lebih dominan.

Mahasiswa sebagai generasi penerus adalah calon pemimpin bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan. Oleh karena itu sudah seharusnya menempa diri dengan belajar sungguh-sungguh baik ekstra kurikuler dan intra kurikuler di lingkungan kampus agar semakin dewasa. Pembelajaran yang sinergis dan demokratis akan menghasilkan calon-calon pemimpin yang kuat, memiliki idealisme tinggi yang memegang teguh etika politik, menegakkan nilai-nilai keadilan untuk mewujudkan Indonesia Baru sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagaimana harapan kita.